

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI
UNTUK MAJU KEMBALI PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DALAM
PERSPEKTIF
ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS *JUDICIAL REVIEW* PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018)**

Karmila Fauziah Matma¹, Anna Triningsih, S.H.,M.Hum²

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

²Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

¹karmilafm729@gmail.com

²anna.triningsih@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang menganut suatu ajaran demokrasi, salah satunya pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang diibaratkan sebagai lambang serta tolok ukur dari suatu sistem demokrasi. Pemilihan umum legislatif juga merupakan waktu yang pas untuk mengevaluasi atau memberikan penilaian kinerja para legislatif dimana perihal tersebut dapat jadi rujukan agar dapat memilah dan memilih para calon legislatif yang memiliki rekam jejak yang kurang baik seperti korupsi, kolusi serta nepotisme serta UUD 1945 memastikan secara tegas, negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan adanya syarat tersebut, salah satu prinsip terpenting dari suatu negara merupakan terdapatnya jaminan kesederajatan untuk tiap orang di hadapan hukum. Oleh sebab itu, skripsi ini menjawab pertanyaan penelitian tentang: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dalam perspektif asas keadilan dan kepastian hukum, 2) Bagaimana konsekuensi hukum kedepan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang memperbolehkan mantan terpidana koruptor kembali mencalonkan diri menjadi calon legislatif dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas keadilan dan kepastian hukum, dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta teknik analisis (content analysis). Hasil dari analisis penelitian ini adalah pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menurut penulis hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pasal 169 huruf d. Sehingga konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 berakibat pada diperbolehkannya mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang dapat maju kembali sebagai calon legislatif dan hal tersebut mencederai kepercayaan rakyat.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Peraturan KPU, Keadilan dan Kepastian Huku

ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF FORMER CORRUPTION
CONFIDENTS TO ADVANCE BACK TO LEGISLATIVE VOTING IN
PERSPECTIVE
PRINCIPLES OF JUSTICE AND LEGAL CONDUCT
(CASE STUDY JUDICIAL REVIEW REGULATION OF THE GENERAL
ELECTION COMMISSION NUMBER 20 OF 2018)

Indonesia is a constitutional democracy that adheres to a democratic teaching, one of which is the implementation of legislative elections which are likened to symbols and benchmarks of a democratic system. Legislative elections are also the right time to evaluate or provide an assessment of the performance of legislators where this matter can be a reference in order to sort and elect legislative candidates who have poor track records such as corruption, collusion and nepotism and the 1945 Constitution ensures firmly Indonesia is a state of law. With these conditions, one of the most important principles of a country is the guarantee of equality for everyone before the law. Therefore, this thesis answers research questions regarding: 1) How is the legal consideration of the Supreme Court Decision Number 46 P / HUM / 2018 in the perspective of the principles of justice and legal certainty, 2) What are the future legal consequences of the Supreme Court Decision Number 46 P / HUM / 2018 which allows former corrupt convicts to run for legislative candidates again in the 2019 Legislative Election. The research method used in this research is normative legal research with an approach to the principle of justice and legal certainty, with sources of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. and analysis techniques (content analysis). The results of the analysis of this research are the legal considerations of the Supreme Court which refer to Law Number 39 of 1999 according to the author, this is contrary to Law No.7 of 2017 article 169 letter d. So that the consequences of the decision of the Supreme Court Number 46 P / HUM / 2018 result in allowing former convicts of corruption, sexual crimes against children, and drug dealers who can come back as legislative candidates and this hurts people's trust.

Keywords: *Corruption Crime, KPU Regulations, Justice and Legal Certainty*